

PEDAGANG KAKI LIMA PADA MASA KRISIS

Agus Joko Pitoyo*

Abstract

Based on a survey of 325 street vendors in Yogyakarta Special Region that was conducted by the Population Studies Center of Gadjah Mada University, this study would like to analyze the contribution of income and prospect of the informal sector on household economy. It was found that earning in the informal sector constitutes the source of household income. Most street vendors said that income in the informal sector would help them improve on the household economic status. Working as a street vendor is a good choice. It has a good prospect and can be developed in the future.

This research has also shown that the informal sector is capable to survive in the crisis. Caused by more flexibility, the number of people absorbed in the informal sector are even able to earn higher incomes. This implies that providing access to informal sector with such a high commitment of both government and non-governmental institutions, it is one important policy in helping them have better conditions in a economic household. Accordingly, it will in turn have an impact on increasing the economic scale of the informal sector.

Pendahuluan

Modernisasi dan industrialisasi kota-kota besar dan menengah di Indonesia telah membawa dampak terhadap pesatnya migrasi desa kota. Selain sebagai dampak dari perkembangan kota, perpindahan penduduk dari desa ke kota juga dapat dipandang sebagai indikator keterbatasan kesempatan kerja, standar upah rendah, dan kemandekan ekonomi perdesaan. Kebijakan pemerintah dalam membangun berbagai unit produksi dan

fasilitas pelayanan yang lebih mementingkan perkotaan (*urban bias*) turut pula menarik penduduk desa untuk melakukan mobilitas, baik mobilitas penduduk sirkuler maupun permanen (Todaro & Stillkind, 1991: 10).

Akumulasi penduduk di kota-kota besar seperti halnya di Indonesia tersebut sering tidak diikuti dengan penyediaan kesempatan kerja formal yang luas. Hal ini memosisikan penduduk

* Agus Joko Pitoyo, S.Si adalah asisten peneliti Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada dan staf pengajar di Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

yang tidak mampu berkompetisi di sektor formal, seperti penduduk dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, cenderung masuk ke sektor informal. Mereka bekerja seadanya, pada lapangan usaha apa saja, tentunya jenis pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan dan pendidikan tinggi (Sethuraman, 1981; Mazumdar, 1984; Adams, 1995). McGee (1971) lebih jauh menjelaskan bahwa tingginya penduduk yang bekerja di sektor informal, terutama di kota-kota besar dan menengah, merupakan akibat dari urbanisasi semu (*pseudo urbanization*), yakni urbanisasi yang tidak diikuti dengan perkembangan ekonomi (*industrialization*) dan kesempatan kerja. Masalah yang muncul dari fenomena tersebut adalah penganggur, setengah penganggur, dan tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan secara penuh. Hal ini tentu saja akan diikuti dengan meluasnya berbagai kegiatan usaha di sektor informal. Setidaknya-tidaknya sebagai kegiatan usaha alternatif agar di kota mereka tetap dapat *survive*.

Aktivitas ekonomi berskala kecil seperti sektor informal merupakan kegiatan usaha yang adaptif terhadap kondisi ekonomi yang buruk. Usaha di sektor informal dapat bertahan karena biasanya menggunakan teknologi sederhana, bahan baku lokal, dan modal relatif kecil. Walaupun begitu, diskursus kedudukan sektor informal di

dalam suatu sistem ekonomi sampai saat ini agaknya masih terus berkepanjangan. Pada satu sisi, sektor informal diakui sebagai sektor yang menjadi bagian dari sistem ekonomi rakyat jelata (*lumpen proletariat economical system*) karena mampu menjadi sektor penyangga (*buffer zone*) yang mampu menyerap jumlah tenaga kerja ketika kondisi ekonomi sulit/krisis (Maldonado, 1995). Begitu pula halnya dengan argumentasi yang dikemukakan oleh paham *developmentalist*, sektor informal memiliki kemampuan berkembang yang sama dengan sektor formal, bahkan mempunyai prospek yang baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan (Sethuraman, 1977; Hosier, 1987, Portes et.al., 1989). Dalam hal ini sektor informal tidak hanya berfungsi sebagai penyangga kelebihan tenaga kerja yang tidak dapat terserap di sektor formal, tetapi juga mempunyai peran yang tinggi dalam peningkatan ekonomi (Souza & Tokman, 1976).

Berbeda halnya dengan pendapat yang diungkapkan oleh paham kaum *marginalist*. Menurutnya, sektor informal merupakan sektor yang bukan saja menghambat pembangunan ekonomi nasional, tetapi juga tidak dapat berkembang. Prospek sektor informal yang rendah ditandai dengan sifat usahanya yang tidak terorganisasi, lokasi usaha tidak teratur, dan bahkan mengganggu ketertiban dan kenyamanan kota

(Benefield, 1975). Lebih lanjut diungkapkan bahwa beberapa karakteristik yang marjinal tersebut tidak akan dapat dihilangkan sehingga sektor ini tidak mungkin berkembang pada masa yang akan datang

Selain perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi, pandangan tentang prospek sektor informal pada *level* nasional juga masih bersifat dualistik. Perbincangan seputar prospek dan perkembangannya pada sistem ekonomi nasional dan bagaimana seharusnya pemerintah melakukan intervensi sering memunculkan argumentasi yang bervariasi (Effendi, 1993: 77-78). Terutama pada masa Orde Baru, sektor informal seperti pedagang kaki lima, merupakan sektor yang cenderung tersisih dari pembangunan. Arah pembangunan lebih difokuskan pada unit-unit produksi skala besar. Konsep *trickle down effect* yang dikembangkan pada sistem kapitalis mengondisikan pedagang kaki lima secara politis tidak mempunyai kekuatan (*power*). Akibatnya, sektor informal berada pada kondisi *bargaining position* yang lemah, sehingga kedudukannya sering diabaikan oleh pemerintah dan bahkan digusur. Pada sisi yang lain, secara ekonomi pedagang kaki lima mempunyai peran yang penting dalam masyarakat. Setidak-tidaknya terdapat dua keuntungan yang diberikan. *Pertama*, komoditi yang diusahakan adalah barang-barang

kebutuhan sehari-hari yang sangat dibutuhkan masyarakat. *Kedua*, teknologi yang digunakan relatif sederhana sehingga harganya lebih murah dibandingkan dengan barang-barang yang disediakan oleh toko-toko besar dan *supermarket*. Terlebih lagi pada masa krisis, masyarakat akan cenderung lebih berpikir pragmatis. Dalam hal ini belanja pada pedagang kaki lima merupakan alternatif utama agar mereka tetap *survive*.

Berdasarkan hasil data sensus penduduk, memang secara relatif pada periode 1980-1995 telah terjadi penurunan tenaga kerja di sektor informal, yaitu dari 69,8 persen pada tahun 1980 turun menjadi 62,9 persen pada tahun 1995. Namun, angka ini tidak diikuti dengan penurunan jumlah absolut tenaga kerja yang terserap di dalamnya, terbukti dengan adanya penambahan sekitar 15,5 juta angkatan kerja yang terserap di sektor informal dari tahun 1980 sampai tahun 1995. Ini berarti bahwa setiap tahun rata-rata terdapat satu juta penambahan tenaga kerja yang masuk ke sektor informal.

Polemik tentang prospek sektor informal yang terus berlangsung, disertai pesatnya penambahan jumlah tenaga kerja yang masuk ke sektor tersebut, mengindikasikan perlunya studi yang secara mendalam menelaah perkembangan dan prospek sektor informal. Terlebih dengan adanya krisis

moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997, perkembangan dan prospek sektor informal lebih menarik lagi untuk dikaji.

Tulisan ini berusaha mengkaji perkembangan dan prospek sektor informal, terutama pedagang kaki lima yang beroperasi di Kotamadya Yogyakarta. Dalam hal ini, sektor jasa-jasa kecil seperti tambal ban, pangkas rambut, grafir, dan lain-lain yang sesungguhnya termasuk pada kategori sektor informal tidak dimasukkan sebagai bagian analisis. Hal ini mengingat perbedaan usaha dan layanan yang diberikan antara jenis usaha jasa dengan pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima yang dimaksud adalah mereka yang berstatus sebagai pemilik usaha dan bukan hanya pekerja (buruh), bekerja di sektor perdagangan pada bangunan usaha yang tidak permanen. Pemilihan pemilik usaha bertujuan untuk menggali kedalaman informasi seperti persepsi, prospek, permodalan, dan manajemen usaha yang dilakukan. Pembahasan tentang prospek dititikberatkan pada *level* rumah tangga dan *level* daerah. Prospek pada *level* rumah tangga dilihat melalui peranannya terhadap kondisi ekonomi rumah tangga. Diasumsikan bahwa sektor informal akan tetap prospektif pada masa mendatang apabila secara nyata memberikan kontribusi terhadap status ekonomi rumah tangga, mampu dijadikan tumpuan

pendapatan rumah tangga, dan diyakini oleh pelaku sebagai sektor andalan. Selain beberapa topik kajian tersebut, beberapa karakteristik internal dari pelaku yang diperkirakan mempengaruhi prospek usaha, seperti jenis kelamin, umur, dan pendidikan juga dianalisis

Pada *level* daerah, telaah tentang prospek sektor informal dikaji melalui distribusi dan perkembangannya. Distribusi secara menyeluruh populasi sektor informal yang terdapat di Kotamadya Yogyakarta dilakukan menurut lokasi usaha, waktu kerja, dan jenis usaha. Berkaitan dengan lokasi usaha, telah dibagi empat blok usaha tempat aktivitas sektor informal berlangsung dengan cara membagi wilayah Kotamadya Yogyakarta menjadi empat bagian, yaitu blok utara bagian barat, utara bagian timur, selatan bagian barat, dan selatan bagian timur. Batas yang digunakan untuk pembagian blok utara dan selatan adalah rel kereta api, sedangkan pembagian blok timur dan blok barat ditentukan dengan membagi wilayah Kotamadya Yogyakarta menjadi dua bagian berdasarkan peta administrasi. Selain untuk tujuan mengetahui konsentrasi sektor informal, pembagian blok usaha tersebut juga dimaksudkan untuk mempermudah *listing*/sensus sektor informal.

Perkembangan sektor informal di Kotamadya Yogyakarta dianali-

sis secara kualitatif. Hal ini mengingat keterbatasan data kuantitatif. Secara kasar dilakukan analisis kuantitatif terhadap perkembangan pedagang kaki lima di Kotamadya Yogyakarta dengan cara membandingkan hasil sensus dari Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) Universitas Gadjah Mada tahun 1998 dengan hasil sensus yang dilakukan oleh Yayasan Dian Desa tahun 1994.

Prospek Sektor Informal: Tinjauan Teoretis

Secara mikro prospek sektor informal dapat dianalisis melalui peranannya terhadap ekonomi rumah tangga dan secara makro dilihat melalui persebaran dan perkembangannya pada unit wilayah. Pada *level* rumah tangga, unit usaha di sektor informal akan dirasakan bermanfaat apabila mampu memberikan dukungan terhadap ekonomi rumah tangga, misalnya melalui penghasilan yang diperoleh, merupakan satu-satunya sumber pendapatan utama rumah tangga atau berfungsi sebagai sumber pendapatan tambahan. Unit usaha di sektor informal dirasakan prospektif pada *level* rumah tangga apabila betul-betul diyakini sebagai tumpuan pendapatan utama rumah tangga. Pada unit wilayah, prospek tersebut dilihat melalui pertumbuhan unit usahanya dari waktu ke waktu. Pertambahan jumlah unit usaha

secara pesat pada suatu wilayah dalam waktu tertentu diasumsikan sebagai indikator bahwa sektor informal mempunyai prospek yang baik.

Perkembangan sektor informal pada unit wilayah tentu saja tidak berjalan secara otomatis. Usaha di sektor ini tidak dapat terlepas dari fleksibilitas daerah, unit-unit ekonomi sekitar, konsentrasi permukiman, pusat pelayanan dan pendidikan, di samping kebijakan dari pemerintah daerah yang bersangkutan. Dalam upaya menjelaskan prospek sektor informal melalui perkembangan usaha secara regional, analisis tentang pertumbuhan dan keterkaitannya dengan sektor lain menjadi bagian yang penting.

Pertumbuhan sektor informal secara pesat telah terjadi di berbagai negara, baik di negara maju maupun negara sedang berkembang (Portes et.al., 1989). Secara teoretis, pertumbuhan sektor informal tersebut dapat ditelaah dari berbagai pendekatan (Berger & Buvinic, 1989) yaitu *theory of excess labor supply, neo-marxist approach, underground approach, and neo-liberal approach*. Pendekatan pertama memandang sektor informal sebagai reaksi terhadap keterbatasan sektor formal di dalam menyerap tenaga kerja. Hal ini terjadi sebagai akibat pasar tenaga kerja yang tidak sempurna (*imperfec labor market*) di sektor formal. Sektor formal cenderung menggunakan

tenaga kerja terampil dengan persyaratan keahlian tertentu, padahal tenaga kerja yang ada tidak semuanya memenuhi persyaratan tersebut. Sebagai akibatnya, tenaga kerja yang tidak terserap pada sektor formal sudah tentu akan mencari usaha alternatif lain yang lebih mudah. Pada tahap berikutnya kelebihan tenaga kerja (*excess labor supply*) akan masuk ke sektor informal.

Neo-Marxist approach memandang bahwa tumbuhnya sektor informal merupakan akibat dari paham kapitalisme yang dikembangkan di negara-negara maju. Paham ini menyebabkan adanya dua sistem ekonomi yang berkembang, yaitu sistem ekonomi inti (*core*) dan sistem ekonomi pinggiran (*peripheral*). Sistem ekonomi yang telah maju biasanya melakukan eksploitasi terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi yang masih terbelakang. Mekanisme ini menyebabkan sistem ekonomi yang masih terbelakang tergantung pada sistem ekonomi maju. Sebagai akibat dari mekanisme tersebut, muncul sistem ekonomi kapitalis yang berkedudukan sebagai sektor formal dan sistem ekonomi tradisional sebagai sektor informal.

Teori pertumbuhan sektor informal yang ketiga adalah *underground approach*. Menurut pendekatan ini, sektor informal tumbuh sebagai akibat kompetisi internasional di antara industri-industri besar dunia. Industri

berskala besar tersebut selanjutnya dikenal sebagai sektor formal. Persaingan ini akan memaksa industri-industri besar melakukan berbagai kegiatan informal agar tetap *survive*. Pada tahap berikutnya akan muncul banyak aktivitas informal, baik institusi maupun industri berskala menengah, yang mendukung industri besar dalam kompetisi ekonomi dunia.

Pendekatan keempat dalam menjelaskan pertumbuhan sektor informal adalah *neo-liberal approach*. Sektor informal muncul sebagai akibat berbagai persyaratan birokratis dan administrasi yang harus dipenuhi untuk menjadi sektor formal (Maldonado, 1995). Akibatnya, banyak unit produksi skala menengah dan kecil yang tidak dapat memenuhi persyaratan birokratis dan administrasi yang ditentukan. Ketidakmampuan unit produksi di dalam memenuhi berbagai persyaratan dan aturan-aturan untuk menjadi sektor formal mengondisikannya menggunakan cara-cara tersendiri yang tidak sesuai dengan cara-cara di sektor formal. Maka dari itu, disebutlah sektor baru yang menggunakan mekanisme usaha sendiri ini sebagai sektor informal.

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Berger & Buvinic (1989), Castells & Portes (1989) menjelaskan lima sebab munculnya sektor informal (*the genesis of informal economy*). *Pertama*, sektor informal merupakan kegiatan

ekonomi individu yang muncul sebagai reaksi dari kegiatan ekonomi skala besar dan terorganisasi. *Kedua*, sektor informal merupakan usaha ekonomi bebas sebagai reaksi dari kegiatan ekonomi pemerintah yang telah dikenai pajak dan memiliki jaminan hukum di dalam usaha. *Ketiga*, sektor informal merupakan usaha lokal yang tidak mampu berkompetisi secara nasional sebagai reaksi dari adanya intervensi ekonomi skala internasional. Unit-unit produksi dalam suatu negara yang mempunyai tingkat kompetisi rendah akan melakukan usaha sendiri tanpa menggunakan cara-cara atau mekanisme usaha yang dilakukan oleh sektor formal. *Keempat*, sektor informal merupakan unit usaha bayangan (*shadow of production*) sebagai reaksi dari modernisasi dan industrialisasi. Mereka adalah unit-unit ekonomi kecil yang tidak termasuk dalam industri-industri yang telah terorganisasi. *Kelima*, sektor informal merupakan kegiatan ekonomi alternatif yang berskala kecil, manajemen individu dan tidak terorganisasi sebagai reaksi dari adanya krisis ekonomi. Krisis ekonomi menyebabkan unit-unit ekonomi yang tidak dapat bertahan pecah menjadi bagian-bagian kecil yang bersifat informal.

Apabila dikaji menurut keterkaitan antarsektor, keterkaitan antara sektor informal dengan sektor formal merupakan aspek

yang tidak dapat dipungkiri dalam suatu sistem ekonomi. Keberadaan sektor formal di kota, misalnya perkantoran atau industri, tidak urung akan diikuti dengan maraknya berbagai sektor informal, seperti pedagang kaki lima dan pelayanan jasa-jasa kecil. Beberapa analisis menunjukkan bahwa keterkaitan sektor formal-informal itu mempunyai hierarkis, biasanya sektor informal berada pada posisi subordinat (Gerry, 1978; Portes & Walton, 1981, Portes et.al., 1989). Sektor informal sering dipandang sebagai sistem ekonomi bayangan (*the shadow of economic production*) yang mempunyai posisi tawar-menawar yang rendah (Nugroho, 1987). Schmitz (1982) menambahkan bahwa subordinasi sektor informal merupakan imbas dari kelemahan sektor informal sendiri, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, sektor informal mempunyai kelemahan dalam kualitas sumber daya manusia pekerja, manajemen, usaha, dan koordinasi. Secara eksternal, sektor informal berhadapan dengan hambatan struktural, baik dalam bentuk persaingan oleh sektor formal/ sektor pemerintah maupun penilaian dari berbagai institusi yang cenderung menyubordinasikan posisi sektor informal.

Secara teoretis kompleksitas keterkaitan antarsektor di dalam sektor informal dikategorikan oleh El Shaks (1984) menjadi dua

tipologi, yaitu *pertama* sektor informal yang aktivitas ekonominya memberikan layanan penting kepada masyarakat kota, berfungsi melengkapi (*substitusi*) sektor formal seperti pengusaha transportasi, pedagang makanan, warung kobo, jasa kecil-kecilan, dan sebagainya. *Kedua*, tipologi sektor informal dengan kegiatan ekonomi yang bersifat marjinal, ilegal, dan cenderung bersifat personal. Aktivitas ekonomi dari tipologi ini biasanya tanpa modal dan lebih menekankan pada kekuatan fisik, seperti pembantu rumah tangga, pengamen, pengemis, pemulung, dll. Selain dua tipologi yang dikembangkan oleh El Shaks (1984), keterkaitan antarsektor pada sektor informal dapat dijelaskan dengan menggunakan paradigma harmoni (*normative order*) dan paradigma konflik (Cuff & Payne, 1979; Bottomore & Nisbet, 1978).

Inti dari paradigma harmoni adalah keseimbangan sosial (*social equilibrium*) dari dua sistem yang nilainya berbeda. Model ini juga sering disebut model dualistik sosial, bahwa di dalam masyarakat transisi akan terbentuk dua sistem sosial yang bersifat paradoks. Sistem sosial yang pertama menggambarkan kondisi keterbelakangan atau tradisionalitas, sedangkan sistem sosial yang kedua merupakan sistem yang telah maju atau modern. Mekanisme dualistik antara sifat tradisional dan modern tersebut selalu termanifestasi dalam

berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam hal ekonomi, teknologi, sosial, maupun politik. Kesemuanya berada di dalam suatu hubungan simbiosis mutualisme, saling menunjang dan keduanya saling memberikan keuntungan, baik secara sosial maupun ekonomi (Booth & McCawley, 1982).

Paradigma konflik menjelaskan keberadaan sektor informal melalui model dependensia. Sektor informal merupakan sektor yang selalu tergantung pada sektor formal. Dalam hal ini, kadangkala terjadi eksploitasi yang dilakukan oleh sektor formal terhadap sektor informal. Pada perkembangan berikutnya, adanya mekanisme substitusi dan fleksibilitas yang diperankan oleh sektor informal, menjadikan sektor ini mempunyai tingkat bertahan hidup yang tinggi dan dapat menjadi sektor penyangga bagi tenaga kerja yang tidak dapat memasuki sektor formal (Portes & Walton, 1981; Swasono, 1986; Hermanto, 1995).

Kenyataan membuktikan bahwa sampai saat ini sektor informal dipandang mempunyai tingkat fleksibilitas dan kemampuan *survive* yang lebih tinggi (Portes et.al, 1989; Julien, 1998). Namun, banyak juga pembuat kebijakan yang masih pesimis. Adanya asumsi pesimis ini sebenarnya berakar dari kendala internal dan eksternal yang masih melingkupi sektor informal. Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa

karakteristik internal dari tenaga kerja yang kurang berkualitas merupakan faktor yang turut menghambat perkembangan sektor informal (Hart, 1973; Moir & Soetjipto, 1977; Mazumdar, 1981; Sethuraman, 1981; Kerner, 1988; Roberts, 1990). Keterbatasan sumber daya tersebut mengharuskan mereka melakukan aktivitas apa saja, terutama status pekerjaan usaha sendiri seperti tukang becak, penjual keliling, pedagang kaki lima, pengemis, pemulung, dll. Kondisi ini secara eksternal merugikan mereka karena pihak pemerintah maupun institusi tingkat lokal cenderung memandangnya sebagai sektor penghambat pembangunan dan tidak mempunyai *bargaining position* yang kuat (Manning et.al., 1987).

Pada diskursus selanjutnya, melihat adanya mekanisme substitusi dan fleksibilitas usaha di sektor informal, akan sangat memungkinkan sektor ini dapat berkembang walaupun dalam kondisi krisis moneter seperti saat ini. Bahkan, sektor informal dapat dijadikan sebagai sistem ekonomi alternatif terhadap unit-unit produksi yang gagal di sektor formal (Sethuraman, 1977; Wallerstein, 1979, Roberts, 1989). Adalah sangat mungkin apabila sektor informal mempunyai kemampuan berkembang yang sama dengan yang dimiliki oleh sektor formal (Souza & Tokman, 1976). Namun, perlu telaah yang lebih

terpadu terhadap peranan dan prospek sektor informal karena sampai saat ini pandangan terhadap peranan dan prospeknya oleh pemerintah masih bersifat ambivalen.

Persebaran Sektor informal di Kotamadya Yogyakarta

Lokasi usaha merupakan variabel yang cukup penting dalam analisis sektor informal. Lokasi usaha tidak hanya menunjukkan tempat aktivitas informal dilakukan, tetapi lebih ke arah strategi untuk mendapatkan konsumen. Tidakkah mengherankan apabila sektor informal cenderung berlokasi di tempat-tempat strategis, misalnya di sepanjang jalan utama, dekat pasar, fasilitas layanan, perkantoran, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil *listing* yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM terlihat bahwa dari sejumlah sektor informal yang ada di Kotamadya Yogyakarta, sebagian besar dari unit usaha terkonsentrasi di pusat kota, terutama di Jalan Malioboro sebesar 987 (18,6 persen) dan Jalan Ahmad Yani sebesar 1012 (19,2 persen). Kedua jalan utama ini pula yang turut menentukan konsentrasi sektor informal yang berada di blok selatan bagian barat, yakni sebesar 59,2 persen dari total unit usaha di Kotamadya Yogyakarta. Selain merupakan jantung kota Yogyakarta, dengan Jalan Malioboro dan Jalan

Ahmad Yani sebagai konsentrasi utama, perkembangan jumlah unit usaha secara historis juga dipengaruhi adanya beberapa bangunan bersejarah seperti Keraton Yogyakarta dan Benteng Vredenburg. Selain itu, konsentrasi unit usaha pada kedua jalan tersebut juga didukung oleh berbagai fasilitas layanan masyarakat Yogyakarta seperti pusat pertokoan, Malioboro Mall, perkantoran, Pasar Beringharjo, gedung bioskop, alun-alun utara, dan lain-lain. Tidak mengherankan apabila secara keseluruhan Jalan Malioboro dan Jalan Ahmad Yani menjadi tempat usaha 63,7 persen dari total unit usaha sektor informal di blok selatan bagian barat.

Selain blok selatan bagian barat, blok utara bagian timur juga merupakan konsentrasi unit usaha sektor informal di Kotamadya Yogyakarta. Terdapat unit usaha

sebesar 21,2 persen dari total sektor informal di Kotamadya Yogyakarta. Sebagian besar dari unit usaha terdapat di sepanjang jalan Laksda Adisucipto dan Urip Sumoharjo (yang juga dikenal dengan Jalan Solo). Kedua jalan tersebut merupakan jalan utama yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi di bagian utara. Berbagai pusat layanan masyarakat seperti rumah sakit, pusat pertokoan, gedung bioskop, dll berderet di sepanjang jalan Laksda Adisucipto dan Urip Sumoharjo. Selain itu, kedua jalan tersebut juga berdekatan dengan institusi pendidikan di Yogyakarta seperti Universitas Gadjah Mada, UNY (Universitas Negeri Yogyakarta), IAIN Sunan Kalijaga, Universitas Sanata Dharma, dan Universitas Atmajaya. Hal ini tentunya akan memungkinkan adanya konsumen dalam jumlah yang cukup besar.

Tabel 1
Persebaran Sektor Informal menurut Blok dan Waktu Usaha

Wilayah/Blok	Waktu Usaha					
	Siang		Malam		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Utara Barat	276	10,8	252	9,2	528	10,1
Utara Timur	528	20,8	592	21,5	1.120	21,2
Selatan Barat	1513	59,4	1625	58,9	3.138	58,9
Selatan Timur	227	9,0	288	10,4	515	9,8
Total	2544	100,0	2757	100,0	5.301	100.0
%	(48,0)		(52,0)		(100,0)	

Sumber: PPK-UGM, 1998

Unit usaha di sektor informal yang beraktivitas pada siang hari dan malam hari secara keseluruhan hampir sama, dengan selisih dua persen, sedikit lebih banyak yang berusaha pada malam hari. Unit usaha yang bekerja pada malam hari biasanya berupa makanan dan minuman. Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa jenis usaha makanan minuman seperti pecel lele, warung kobo, bakmi, dan warung makan lesehan memang banyak yang beroperasi pada malam hari. Selain banyaknya konsumen pada malam hari, seperti pelajar/mahasiswa, biasanya mereka mendirikan tempat usaha dengan cara tinggal menempati saja, yang pada waktu siang tempat itu digunakan untuk aktivitas lain. Selain itu, pekerja di sektor informal juga banyak yang melakukan kerja lain pada siang hari.

Selain berdasarkan waktu kerja dan blok usaha, distribusi sektor informal juga dapat dikaji menurut jenis usahanya. Pembagian sektor informal menurut jenis usaha dilakukan dengan cara melihat komoditi yang dominan diusahakan, dengan tujuan mengetahui jenis usaha apa yang dominan diminati, menguntungkan, dan prospektif untuk dikembangkan. Identifikasi sektor informal menurut jenis usaha menghasilkan 6 kategori, yaitu : (1) makanan dan minuman, termasuk di dalamnya makanan santap, piringan, makanan jajan (gorengan, kue, kacang-

jagung rebus), buah-buahan, aneka minuman dll; (2) kelompok tekstil, pakaian dan kulit, termasuk di dalamnya sandal, sepatu, ikat pinggang, pakaian jadi, kaos kaki, handuk dll; (3) kebutuhan sehari-hari, termasuk di dalamnya beras, gula, rokok, sabun, minyak (minyak goreng, bensin, oli) dll; (4) kelompok kertas dan plastik, termasuk di dalamnya buku-buku, koran, majalah, stiker, helm dll; (5) kelompok jasa, termasuk di dalamnya bengkel, servis (motor, sepeda, arloji, korek api), tambal ban, sol sepatu, stempel, grafir, pangkas rambut, afdruck foto, peramal dll; (6) kelompok kerajinan, mainan dan aksesoris, termasuk di dalamnya perkakas rumah tangga (piring, gelas, panci), kerajinan (kayu, kain, gerabah), barang-barang mainan, aksesoris (kaca mata, anting-anting, gelang, cincin), dll.

Berdasarkan jenis usaha, kelompok makanan, minuman, dan kebutuhan sehari-hari merupakan kelompok yang dominan dimasuki oleh tenaga kerja. Hal ini cukup beralasan karena baik kelompok makanan, minuman, maupun kebutuhan sehari-hari merupakan komoditi pokok yang diperlukan oleh setiap individu. Banyaknya konsumen ini juga didukung oleh kedudukan Yogyakarta sebagai kota pelajar, tempat konsentrasi mahasiswa/pelajar. Selain itu, faktor yang berpengaruh terhadap menjamurnya jenis usaha makanan

Tabel 2
Persebaran Sektor Informal menurut Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah	%
Makanan dan minuman	2.295	43,3
Tekstil, pakaian, kulit	734	13,8
Kebutuhan sehari-hari	744	14,0
Kertas & plastik	228	4,3
Kelompok jasa	655	12,4
Kerajinan, mainan, aksesoris	645	12,2
Total	5.301	100,0

Sumber: PPK-UGM, 1998

dan minuman adalah aspek kemudahan di dalam memasukinya, berikut kesederhanaan teknologi yang digunakan. Berdasarkan Tabel 2 juga dapat dilihat bahwa jenis usaha tekstil, pakaian, dan kulit persentasenya cukup tinggi. Kebanyakan pekerja pada jenis usaha ini adalah pedagang pakaian yang beroperasi di sepanjang Jalan Malioboro dan Ahmad Yani. Konsentrasi jenis usaha tekstil, pakaian, dan kulit di kedua jalan tersebut juga terkait dengan keramaian pejalan kaki yang ada, selain juga banyak turis asing yang berbelanja tekstil dan batik untuk cinderamata di negara asalnya.

Perkembangan Sektor Informal

Informasi tentang perkembangan sektor informal di Kotamadya Yogyakarta tidak banyak diperoleh

dari lapangan karena penelitian sebelumnya yang secara lengkap mengkaji berbagai aspek yang terkait dengan sektor informal belum banyak dilakukan. *Listing* terhadap sektor informal di Kotamadya Yogyakarta pernah dilakukan oleh Yayasan Dian Desa pada tahun 1994, walaupun ada sedikit perbedaan ruas jalan yang diteliti dengan apa yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM. Yayasan Dian Desa melakukan *listing* terhadap 84 jalan dengan memperoleh sebesar 3.334 unit usaha sektor informal. Konsentrasi sektor informal juga terletak di Jalan Malioboro sebesar 760 usaha dan Jalan A. Yani sebesar 388 usaha. Secara kasar perkembangan sektor informal di Kotamadya Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 3.

Secara keseluruhan dari tahun 1994 sampai tahun 1998, jumlah sektor informal yang ada di Kotamadya Yogyakarta mengalami peningkatan yang cukup berarti, sebesar 1967 unit usaha. Rata-rata pertambahan jumlah unit usahanya kurang lebih sekitar 500 unit setiap tahun. Angka ini termasuk tinggi apabila dikaitkan dengan wilayah kotamadya yang sudah padat. Pertambahan cukup tinggi terjadi di Jalan A.Yani, sekitar 150 unit usaha setiap tahun, relatif lebih besar daripada pertambahan jumlah unit usaha di Jalan Malioboro. Hal ini terkait dengan mengendurnya peraturan yang sebelumnya tidak boleh berjualan di Jalan A. Yani, terutama bagian selatan. Dengan mengendurnya peraturan tersebut, saat ini dapat dilihat bahwa di Jalan A. Yani bagian selatan pun dipenuhi pedagang kaki lima. Begitu pula dengan informasi yang disampaikan oleh salah seorang pedagang kaki lima di kawasan Malioboro. Sekitar tiga tahun

terakhir ini, pertambahan jumlah pedagang kaki lima sangat pesat. Lokasi di depan Benteng Vredeborg dan Kantor Pos Pusat Yogyakarta yang dahulu tidak boleh digunakan untuk berjualan sekarang penuh oleh pedagang. Tempat pemberhentian bus sementara yang dahulu berada tepat di depan Kantor Bank Indonesia, akibat penuh oleh pedagang kaki lima, sekarang bergeser ke arah depan RS PKU Muhammadiyah.

Pertambahan jumlah unit usaha sektor informal, terutama pedagang kaki lima, tampak jelas di sekitar kampus baik Universitas Gadjah Mada maupun UNY. Beberapa sumber menyebutkan bahwa sekitar tahun 1992 jumlah pedagang kaki lima di sekitar kampus tidak sebanyak saat ini. Dahulu trotoar yang ada di sekitar kampus tidak boleh digunakan untuk berdagang. Namun, pada saat ini usaha kaki lima hampir memenuhi ruas kanan kiri Jalan Kaliurang dari sekitar Mirota

Tabel 3
Perkembangan Sektor Informal berdasarkan Dua Jalan Utama dan Total Populasi

Lokasi Usaha	Penelitian Dian Desa 1994			Penelitian PPK-UGM 1998			Pertambahan unit usaha (1994-1998)
	Siang (%)	Malam (%)	Total (N)	Siang (%)	Malam (%)	Total (N)	
Jl. Malioboro	91,5	9,5	760	46,7	53,3	987	227
Jl. Ahmad Yani	92,7	7,3	338	43,8	56,2	1.012	664
Total di Kotamadya Yogyakarta	3.334			5.301			1967

Sumber: PPK-UGM, 1998 dan Dian Desa, 1994

Kampus sampai *ring road* utara (Saraswati, 1998).

Namun, apabila menilik kembali perbedaan hasil sensus yang dilakukan oleh PPK-UGM dengan Yayasan Dian Desa, agaknya perlu berhati-hati di dalam menyikapinya. Perbedaan cakupan jumlah unit usaha tersebut diperkirakan berkaitan dengan perbedaan konsep waktu kerja, terbukti dengan perbedaan yang mencolok pada persentase sektor informal yang bekerja siang dan malam antara tahun 1994 dan 1998. Selain itu, jumlah jalan yang digunakan untuk *listing* juga berbeda, yakni sebesar 84 jalan untuk tahun 1994 dan hanya 77 jalan untuk tahun 1998. Walaupun begitu, setidaknya secara kuantitatif dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 4 tahun telah terjadi penambahan jumlah unit usaha sektor informal.

Karakteristik Pelaku Pedagang Kaki Lima

Aspek internal dari pekerja merupakan faktor yang cukup penting terhadap perkembangan usaha di sektor informal. Unit usaha akan berjalan dengan baik apabila ditopang oleh kemampuan internal pelaku, baik kualitas produksi, kemampuan manajerial dan akses terhadap pengembangan usaha. Beberapa studi empiris yang pernah dilakukan menemukan adanya karakteristik tertentu yang

terkait dengan sektor informal seperti jenis kelamin, umur, dan pendidikan (Manning, 1996; Hidayat, 1978; Evers & Effendi, 1992).

Apabila dikaji berdasarkan jenis kelamin pekerja, aktivitas pedagang kaki lima lebih didominasi oleh jenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Perbandingan pemilik usaha laki-laki hampir dua kali dari pemilik usaha perempuan. Hampir di setiap jenis usaha, persentase pemilik usaha laki-laki, kecuali pada jenis kebutuhan sehari-hari selalu lebih tinggi. Hasil pengamatan di lapangan pun menunjukkan bahwa pemilik usaha dengan jenis kelamin laki-laki lebih dominan. Dominasi pedagang kaki lima laki-laki terhadap perempuan agaknya tetap relevan apabila dikaji menurut kedudukan laki-laki sebagai pencari nafkah yang utama di dalam rumah tangga. Sampai saat ini, terutama pada masyarakat di Jawa, tetap diakui bahwa sebagian besar laki-laki berkedudukan sebagai kepala rumah tangga. Dengan demikian, laki-laki yang harus bekerja dan bertanggung jawab dalam hal ekonomi. Selain itu, secara fisik pun laki-laki cenderung lebih kuat dibandingkan dengan perempuan sehingga dialah yang lebih dominan di sektor publik.

Menyikapi rendahnya pemilik usaha perempuan dari laki-laki, agaknya perlu berhati-hati,

Tabel 4
Jenis Kelamin dan Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan
Makanan dan minuman	57,4	47,1
Tekstil, pakaian dan kulit	9,3	5,0
Kebutuhan sehari-hari	17,6	38,0
Kelompok kertas dan plastik	7,4	5,8
Kelompok kerajinan, mainan dan aksesoris	11,3	4,1
Total %	100,0	100,0
N (total=325)	204	121
% terhadap total N	62,8	37,2

Sumber: PPK-UGM, 1998

terutama pada pemilik usaha laki-laki yang berstatus kawin. Boleh jadi usaha yang dilakukan sesungguhnya milik bersama-sama atau bahkan milik perempuan. Tingginya pemilik usaha dengan jenis kelamin laki-laki ini diperkirakan juga terkait dengan budaya pada masyarakat patriarki yang cenderung menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga sehingga semua aset rumah tangga adalah milik suami.

Menurut umur, persentase unit usaha pedagang kaki lima semakin meningkat sejalan dengan peningkatan kelompok umur, dengan persebaran setiap kelompok umur yang hampir merata. Hubungan antara status usaha informal yang didominasi oleh penduduk umur pertengahan tidak tampak secara

nyata. Satu hal yang patut diperhatikan adalah bahwa sektor informal, terutama pedagang kaki lima, mempunyai tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam memasukinya (Tabel 5). Secara keseluruhan tampak bahwa kemudahan dalam memasukinya merupakan faktor penjabar distribusi pelaku pedagang kaki lima pada setiap kelompok umur. Setiap tenaga kerja dapat memasuki dan beraktivitas di dalamnya tanpa memandang faktor umur. Usaha pedagang kaki lima mampu menampung tenaga kerja dari segala umur, baik anak-anak, muda, maupun tua.

Menurut pendidikan, lebih dari separo pelaku sektor informal pedagang kaki lima berada pada tingkat pendidikan sekolah dasar. Rendahnya tingkat pendidikan

Tabel 5
Alasan Memilih Pekerjaan

Jenis Usaha	Alasan Menjadi Pedagang kaki lima			
	Mudah/ bisanya hanya ini	Menguntung- kan	Tertarik/ coba-coba	Warisan keluarga
Makanan dan minuman	49,1	50,0	67,0	41,2
Tekstil, pakaian, kulit	2,9	3,8	8,5	14,7
Kebutuhan sehari-hari	33,9	19,2	10,6	26,5
Kertas, plastik, koran	7,6	11,5	4,3	5,8
Kerajinan, mainan, aksesoris	6,5	15,5	9,6	11,8
Total %	100,0	100,0	100,0	100,0
N (total=325)	171	26	94	34
% terhadap total N	52,6	8,0	28,9	10,5

Sumber: PPK-UGM, 1998

pekerja ini mempertegas asumsi bahwa jenis usaha pedagang kaki lima tidak memerlukan persyaratan pendidikan formal yang tinggi untuk memasukinya. Akibat teknologi yang digunakan relatif sederhana, tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah atau bahkan tidak tamat sekolah dasar pun dapat dengan mudah melakukannya.

Pelaku pedagang kaki lima pada tingkat pendidikan menengah dan tinggi juga relatif tinggi, dengan persentase yang hampir sama. Semakin nyata bahwa usaha pedagang kaki lima dapat dimasuki penduduk dari jenjang pendidikan apa saja, baik pendidikan rendah maupun tinggi. Hal ini dapat

dikaitkan pula dengan keterbatasan kesempatan kerja yang terdapat di perkotaan. Idealnya, mereka yang berpendidikan relatif tinggi tidak seharusnya masuk ke sektor informal, namun karena keterbatasan kesempatan kerja di sektor formal, mereka terpaksa masuk ke sektor informal. Sebagian dari pekerja yang memberikan alasan masuk ke sektor informal karena coba-coba adalah mereka yang berpendidikan relatif tinggi.

Dampak Krisis terhadap Pedagang Kaki Lima

Krisis yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 telah menampar hampir semua unit produksi

Tabel 6
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Jenis Usaha	Tingkat Pendidikan		
	SD*	SLTP	SLTA+
Makanan dan minuman	48,0	51,2	40,8
Tekstil, pakaian, kulit	6,0	8,1	7,0
Kebutuhan sehari-hari	34,0	27,9	23,9
Kertas, plastik, koran	4,0	2,3	15,6
Kerajinan, mainan, aksesoris	8,0	10,5	12,7
Total persen	100,0	100,0	100,0
N (total = 325)	168	86	71
% terhadap total N	51,7	26,5	21,8

Sumber: Data Primer, PPK-UGM, 1998

* Termasuk di dalamnya yang tidak tamat SD

pada suasana yang penuh kekhawatiran dan ketidakpastian. Berbagai unit produksi skala besar yang diharapkan mampu memberikan *trickle down effect* kepada masyarakat dan unit usaha yang berskala lebih rendah tidak dapat bertahan dan bahkan menurunkan kegiatan produksinya. Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan-perusahaan berskala besar merupakan hal yang lumrah dan banyak terjadi. Jumlah setengah penganggur dan pengangguran terbuka meningkat tajam, diperkirakan sekitar 80 sampai 100 juta (*Kompas*, 1998, 1 September: 1)

Tidak terkecuali pedagang kaki lima, hembusan angin krisis juga mengguncang usaha mereka. Harga bahan baku menjadi me-

ningkat, modal yang diperlukan untuk usaha pun turut meningkat. Namun, disebabkan teknologi sederhana, bahan baku lokal dan produk yang diusahakan dibutuhkan oleh orang banyak, lambat laun mereka menemukan mekanisme bertahan tersendiri terhadap krisis. Bahkan, resistensi sektor informal ini dijadikan sebagai alternatif usaha bagi sebagian tenaga kerja dari sektor formal yang terpaksa kehilangan pekerjaan. Banyak selebritis di Jakarta yang membuka kafe di kaki lima sekitar Monas dan Blok M (*Kompas*, 1998, 24 Agustus: 17). Walaupun tidak untuk membuat mereka menjadi kaya raya, setidaknya sektor informal dapat dijadikan sebagai mekanisme untuk bertahan hidup.

Sebagaimana yang diungkapkan dalam pendahuluan, prospek pedagang kaki lima pada masa krisis selain dilihat dari perkembangan secara regional, juga dapat dilihat dari *level* rumah tangga. Pada *level* rumah tangga, prospek pedagang kaki lima dilihat melalui sumbangan penghasilan dari usaha terhadap pendapatan rumah tangga. Berdasarkan analisis dari 325 sampel pedagang kaki lima yang diambil, sebanyak 155 unit usaha (47.7 persen) mengemukakan bahwa usaha pedagang kaki lima merupakan satu-satunya sumber pendapatan rumah tangga (Tabel 7). Bagi responden yang tidak hanya mengandalkan pada sektor informal, yakni 169 unit usaha, terlihat bahwa peranan sektor informal terhadap ekonomi rumah

tangga sangat tinggi. Hal ini terbukti dengan besarnya sumbangan penghasilan usaha pedagang kaki lima, lebih dari separo total pendapatan rumah tangga, yaitu rata-rata sebesar 64,3 persen.

Berkaitan dengan peranan sektor informal dalam mempertahankan ekonomi rumah tangga, agaknya pada masa mendatang sektor informal, terutama pedagang kaki lima, masih prospektif sebagai sektor pengganti (*substitute*) dari tenaga kerja yang tidak dapat masuk ke sektor formal. Walaupun dalam kondisi krisis, sebagian besar dari responden (76 persen) menyatakan bahwa untuk periode yang akan datang, pedagang kaki lima merupakan usaha yang tetap menjanjikan dan hanya 20,8 persen yang menjawab kurang mengun-

Tabel 7
Sumber Pendapatan Utama

Jenis Usaha	Sumber Pendapatan Selain Sektor Informal		
	Tidak ada	Bekerja Lainnya	Bantuan saudara
Makanan dan minuman	56,2	56,9	46,4
Tekstil, pakaian, kulit	7,7	2,8	5,1
Kebutuhan sehari-hari	16,8	33,3	33,0
Kertas, plastik, koran	9,0	4,2	5,2
Kerajinan, mainan, aksesoris	10,3	2,8	10,3
Total %	100,0	100,0	100,0
N (total=325)	155	72	97
% terhadap total N	47,7	22,2	29,9

Sumber: PPK-UGM, 1998

tungkan (Tabel 8). Peran pedagang kaki lima pada masa yang akan datang semakin nyata apabila dikaji menurut rencana pindah kerja atau tidak. Hanya 8 dari 325 pelaku pedagang kaki lima yang mempunyai keinginan untuk berganti pekerjaan. Tampak bahwa pedagang kaki lima merupakan pekerjaan yang dijadikan sebagai tumpuan ekonomi, selain pekerjaan alternatif di saat krisis.

Walaupun pada jangka panjang prospek pedagang kaki lima cukup baik, keberadaan krisis ekonomi saat ini tetap dirasakan sebagai hambatan yang cenderung mengurangi keuntungan yang diperoleh. Dapat dipahami bahwa bahan baku yang lebih mahal akan mempertinggi biaya produksi sehingga mengurangi persentase keuntungan yang diperoleh.

Sebesar 78,2 persen dari 325 pedagang kaki lima mengungkapkan bahwa krisis ekonomi saat ini mengurangi jumlah pembeli, yang pada akhirnya diikuti dengan penurunan keuntungan. Sebesar 19,4 persen dari total responden tidak merasakan pengaruh krisis terhadap keuntungan. Diperkirakan usaha yang keuntungannya tidak dipengaruhi oleh krisis adalah usaha yang banyak dibutuhkan oleh konsumen dengan harga bahan baku yang relatif murah. Selama krisis berlangsung, masyarakat akan lebih bersifat pragmatis. Mereka akan mencari barang-barang yang relatif lebih murah sebagaimana yang diajakan oleh pedagang kaki lima.

Apabila dikaji menurut keadaan usaha satu tahun yang lalu, sebesar 69,8 persen dari 325 pedagang kaki

Tabel 8
Prospek Kelangsungan Usaha

Blok Usaha	Prospek usaha di saat krisis		
	Menguntungkan	Sama saja	Tidak Menguntungkan
Blok Utara-Barat	8,4	10,0	13,5
Blok Utara-Timur	21,4	30,0	20,8
Blok Selatan-Barat	60,6	30,0	59,7
Blok Selatan-Timur	9,6	30,0	6,0
Total %	100,0	100,0	100,0
N (total=325)	249	10	67
% terhadap total N	76,5	2,7	20,8

Sumber: PPK-UGM, 1998

lima merasakan dampak nyata dari krisis ekonomi yang merugikan. Satu hal yang cukup menarik, sebesar 8,3 persen unit usaha justru diuntungkan dengan adanya krisis ekonomi. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, mereka itu adalah penjual angkringan yang relatif menjual dagangan dengan harga murah. Akibat dagangan yang relatif murah, sering dijadikan alternatif bagi konsumen yang

hanya mempunyai uang dalam jumlah terbatas.

Berdasarkan beberapa bukti tersebut tampak nyata bahwa keberadaan krisis saat ini oleh sebagian besar pedagang kaki lima dianggap sebagai kendala yang mengurangi keuntungan. Namun, dalam jangka panjang usaha pedagang kaki lima tetap diyakini sebagai usaha yang tetap menjanjikan dari segi penghasilan.

Tabel 9
Pengaruh Krisis Terhadap Kegiatan Usaha

Pengaruh Krisis Terhadap Kegiatan Usaha	Frekuensi	%
Tidak berpengaruh	63	19,4
Pembeli, keuntungan berkurang	254	78,2
Keuntungan bertambah	4	1,2
Tidak tahu	4	1,2
Total	325	100,0

Sumber: Data Primer, PPK-UGM, 1998

Tabel 10
Keadaan Usaha Dibanding Setahun Lalu

Keadaan usaha	Frekuensi	%
Usaha belum ada satu tahun	16	4,9
Lebih baik	27	8,3
Biasa/sama saja	55	16,9
Lebih buruk	227	69,8
Jumlah	325	100,0

Sumber: Data Primer, PPK-UGM, 1998

Intervensi Pemerintah

Tampak nyata bahwa sebagian besar dari pedagang kaki lima optimis terhadap prospek yang diperankan oleh aktivitas usahanya. Bekerja sebagai pedagang kaki lima telah menjadi bagian dari hidup mereka, sebagai pekerjaan utama dan tumpuan pendapatan rumah tangga. Namun, oleh sebagian aparat pemerintah sektor ini masih dipandang dengan sebelah mata, terbukti dengan beberapa kejadian pengrusakan dan pembersihan dengan dalih mengganggu ketertiban. Hal ini tidak lain merupakan akibat dari karakteristik usahanya yang masih menyimpan beberapa kelemahan, seperti sumber daya internal pengusaha yang relatif rendah dan eksistensi usahanya tidak legal.

Pada umumnya usaha pedagang kaki lima memang bertempat di trotoar jalan, bahkan sering pula menghabiskan ruang untuk pejalan kaki, padahal apabila ditilik dari Undang-Undang Lalu Lintas, Undang-Undang No. 14 Tahun

1992, pemerintah melarang penggunaan kaki lima (trotoar) untuk berdagang karena mengganggu ketertiban, kebersihan, dan keamanan. Secara “normatif-legalitas” usaha pedagang kaki lima yang menghabiskan bagian trotoar jalan dipandang mengganggu aktivitas pejalan kaki dan menyimpang dari peraturan.

Pada sisi yang lain, pemerintah pun mengakui bahwa keberadaan pedagang kaki lima mempunyai kontribusi yang riil terhadap peningkatan kondisi sosial ekonomi rumah tangga dan daerah. Sebagai contoh, dalam kerangka otonomi daerah, aktivitas usaha pedagang kaki lima merupakan alternatif pengembangan ekonomi rakyat yang akan mempertinggi pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat dari sumbangan pedagang kaki lima melalui retribusi luar pasar yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

Berdasarkan hasil diskusi dengan bagian perekonomian Kotamadya Yogyakarta terdapat

Tabel 11
Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah

Jenis Pendapatan Daerah	Penerimaan (juta rupiah)				
	1991/ 1992	1992/ 1993	1993/ 1994	1994/ 1995	1995/ 1996
Pajak Pembangunan I	24,46	24,83	32,19	36,60	43,78
Retribusi Luar Pasar	88,22	96,23	221,43	225,14	232,01

Sumber: PPK UGM, 1998

beberapa hal positif dari pedagang kaki lima. *Pertama*, menciptakan peluang kerja sebagai akibat fleksibilitas dan substitusi yang diperankan. *Kedua*, menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*). *Ketiga*, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi pengusaha dan konsumen. *Keempat*, mendukung pariwisata, sebagai contoh pedagang kaki lima di kawasan Malioboro. *Kelima*, pedagang kaki lima mempunyai keterkaitan *input* dan *output* dari unit usaha yang lebih besar, termasuk di dalamnya sebagai media pemasaran produksi dari industri-industri lain.

Mengkaji lebih lanjut peranan pedagang kaki lima dalam pembangunan daerah, pemerintah Kotamadya Yogyakarta tidak secara keras melarang keberadaan pedagang kaki lima. Pemerintah mengupayakan beberapa bentuk pembinaan dan pengembangan seperti halnya lokasi usaha, waktu usaha, pengelompokan jenis usaha, koordinasi usaha dan sosialisasi peraturan. Beberapa peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah antara lain meliputi:

1. tidak diperkenankan menempati penggal-penggal jalan yang dilarang,
2. tidak meninggalkan peralatan dagang di tempat berjualan,
3. membuang limbah dan sisa-sisa dagangan tidak pada tempatnya,

4. tidak mengabaikan jam buka dan tutup,
5. diseyogikan untuk bergabung dengan institusi pembina dan koperasi, dan
6. dilarang memberikan harga yang tidak sesuai atau mengabaikan standar harga yang telah disepakati dengan pedagang lain, dan lain-lain.

Berkaitan dengan waktu usaha, pemerintah tidak menghendaki penggunaan trotoar untuk usaha secara permanen. Untuk itu telah ditentukan jadwal waktu sebagai berikut:

- waktu pagi dan siang
pukul 04.00 – 09.00 WIB dan
pukul 09.00 – 15.00 WIB
- waktu sore dan malam
pukul 15.00 – 21.00 WIB dan
pukul 21.00 – 04.00 WIB

Pedagang kaki lima diharapkan memilih rentang waktu tersebut sehingga tidak mengganggu pejalan kaki dan menghindari pendirian unit usaha yang bersifat permanen.

Untuk memperkuat beberapa peraturan tersebut, Walikotamadya Kdh. Tingkat II Yogyakarta mengeluarkan Keputusan No. 311/KD/1995 tentang pengaturan pedagang kaki lima di wilayah Kotamadya Yogyakarta. Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum diberi wewenang dalam penentuan lokasi dan secara koordinatif dapat bekerja sama dengan Dinas Tata Kota, Dinas Kebersihan dan

Pertamanan, dan instansi terkait. Sosialisasi, pembinaan, dan pengembangan pedagang kaki lima di Kotamadya Yogyakarta dilakukan oleh bagian perekonomian. Diharapkan dengan berbagai bentuk koordinasi itu, keberadaan sektor informal di Kotamadya Yogyakarta mampu memberikan peranan terhadap perbaikan ekonomi, baik pada *level* rumah tangga maupun daerah.

Kesimpulan

Keberadaan sektor informal, terutama pedagang kaki lima, di Kotamadya Yogyakarta pada masa yang akan datang agaknya tetap mempunyai prospek yang cukup menjanjikan. Secara regional telah terjadi penambahan unit usaha pedagang kaki lima yang cenderung akan semakin meningkat. Pemerintah pun telah memberikan beberapa bentuk peraturan dalam rangka pembinaan dan pengembangan. Fleksibilitas usaha pedagang kaki lima sangat memungkinkan berkembangnya usaha ini dari waktu ke waktu. Bagi sebagian masyarakat pedagang kaki lima mampu menyediakan barang-barang dengan harga yang relatif lebih murah.

Begitu pula pada unit rumah tangga, usaha pedagang kaki lima semakin dirasakan manfaatnya sebagai sumber pendapatan utama rumah tangga. Walaupun disadari bahwa adanya krisis ekonomi telah berdampak pada penurunan keuntungan, sebagian besar pelaku pedagang kaki lima tetap akan bertumpu pada usaha ini. Bekerja sebagai pedagang kaki lima tetap akan menjanjikan dari segi pendapatan, walaupun tidak untuk tujuan membuat pelakunya kaya raya, setidaknya-tidaknya mereka dapat *survive* pada masa krisis. Usaha pedagang kaki lima merupakan salah satu aktivitas yang akan tetap mempunyai prospek pada masa mendatang. Untuk itu, segala kebijakan pembinaan dan pengembangan yang telah dicanangkan oleh pemerintah tidak hanya pada tataran formal, tetapi perlu adanya implementasi secara riil. Pemerintah diharapkan dapat mengangkat mereka sebagai mitra kerja pembangunan sekaligus memberikan keleluasaan untuk berusaha. Secara legal diperlukan pula jaminan hukum bagi usaha mereka agar tidak disewenang-wenangkan oleh pemerintah daerah atau bahkan digusur.

Referensi

- Berger, M., dan M. Buvinic, eds. 1989. *Women's venture assistance to the informal sector in Latin America*. West Hartford, Connecticut: Kumarin Press.
- Bieneffield, M. 1975. "The informal sector and peripheral capitalism: the case of Tanzania", *Bulletin of the Institute of Development Studies*, 6(3): 53-75.
- Booth, Ane dan Peter McCawley. 1982. *Ekonomi orde baru*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Bottomore, Tom dan Robert Nisbet. 1978. *A history of sociological analysis*. New York: Basic Book.
- Breman, Jan. 1980. *The informal sector in research: theory and practice*. Rotterdam: The Comparative Asian Studies Programme (CASP), University of Rotterdam.
- Bromley, Ray dan Chris Gerry, ed. 1979. *Casual work and poverty in third world cities*. Chicester: John Wiley and Sons.
- Cuff, E.C., dan G.C.F. Payne. 1979. *Perspective in sociology*. London: George Allen & Ulwin.
- "Dua dari tiga penduduk Indonesia miskin sekali". 1998. *Kompas*, 1 September.
- Effendi, Tadjuddin Noer. 1993. *Sumber daya manusia, peluang kerja dan kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- El Shaks, Salah. 1984. "On city size and the contribution of the informal sector: some hypotheses and research questions", *Regional Development Dialogue*, 5(2): 67-81.
- Evers, Hans Dieter dan Tadjuddin Noer Effendi. 1992. *Trade and informal sector policy in Central Java*, Yogyakarta: Population Studies Center, Gadjah Mada University.
- Hart, Keith. 1973. "Informal income opportunities and urban employment in Ghana", *Journal of Modern African Studies*, 11(1): 61-69.
- Hidayat. 1978. *Pengembangan sektor informal dalam pembangunan nasional: masalah dan prospek*. Bandung: PPESM, Fakultas Ekonomi, Universitas Padjadjaran.
- Hosier, R.H. 1987. "The informal sector in Kenya: spatial variation and development alternatives", *Journal of Developing Areas*, Vol. 24:338-402.
- International Labour Organization. 1972. *Employment, income and equality: a strategy for increasing productive employment in Kenya*. Geneva.
- "Kafe artis menjamur, kaki lima menjerit". 1998. *Kompas*, 24 Agustus, hal: 17.
- Kerner, D.O. 1988. "Hard work and informal sector trade in Tanzania", dalam Garcia Clark,

- ed. *Traders versus the state: anthropological approaches to unofficial economics*. s.l.: Westview Press.
- Manning, Chris; Tadjuddin Noer Effendi dan Tukiran, 1996. *Struktur pekerjaan, sektor informal dan kemiskinan di kota*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.
- Mazumdar, Dipak. 1984. "The urban informal sector", *World Development*, 4(8): 655-679.
- McGee, T.U. 1971. "Catalyst or coner? the role of cities in Asean society", dalam Jacobson dan Prakash, eds. *Urbanization and national development*. s.l.: s.n..
- Moir, Hazel dan Soetjipto Wirosardjono. 1977. "Sektor informal di Jakarta", *Widyapura*, 1(9-10):49-70.
- Portes, A., dan J. Walton. 1981. *Labor, class and the international system*. New York: Academic Press.
- Portes, A., dan Manuel Castells.1989. "World underneath: origins, dynamics, and effects of the informal economy", dalam Alejandro Portes; Manuel Castells and Lauren A. Benton, eds. *The informal economy: studies in advanced and less developed countries*. Baltimore: The John Hopkins University Press.
- Portes, A.; Manuel Castells and Lauren A. Benton.1989. *The informal economy: studies in advanced and less developed countries*. Baltimore: The John Hopkins University Press.
- Roberts, Bryan R. 1989. "Employment structure, life cycle, and life chances: formal and informal sectors in Guadalajara", dalam Alejandro Portes; Manuel Castells and Lauren A. Benton, eds. *The informal economy: studies in advanced and less developed countries*. Baltimore: The John Hopkins University Press.
- Sagir, Soeharso. 1986. "Sumbangan sektor informal dalam penyebaran tenaga kerja", makalah Seminar Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Sethuraman, S.V. 1981. *The urban informal sector in developing countries, employment, poverty and environment*. Geneva: International Labour Organization.
- Sinclair, W. 1978. *Urbanization and labor markets in developing countries*. New York: St. Martin's.
- Souza, P.R., dan V.E. Tokman. 1976. "The urban informal sector in Latin America", *International Labor Review*, (114): 138-148.
- Swasono, Sri-Edi.1986. *Studi kebijakan pengembangan sektor informal*. Jakarta: LSP dan IDS.